

## **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN REKRUTMEN CPNS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BATAM TAHUN 2019**

Veby Irton<sup>1</sup>, Nur Aslamaturrahma Dwi Putri<sup>2</sup>, Kustiawan<sup>3</sup>  
vebyirton4@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### **ABSTRACT**

*People with disabilities have the same rights and obligations as non-disabled people. People with disabilities should get special treatment. In the implementation of Civil Servants candidates, it has been regulated in the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 23 of 2019 concerning Criteria for Determining the Needs of Civil Servants and Implementation of the Selection of Candidates for Civil Servants of 2019, which states that the number of positions that people with disabilities can apply for Regional agencies are at least 2 (two) percent of the total formation according to the needs of each agency. In 2019, the Government of Batam City opened two formations for people with disabilities, namely the First Expert Formation- Class Teacher and the second formation Implemented/Skilled- Medical Recorder with educational qualifications of S-1 Elementary Teacher Education (PGSD) and D-III Medical Recorders, in 2019 in the recruitment of Civil Servants in Batam City, there were no people with disabilities who registered to take the test. The purpose of this research is to find out what are the obstacles experienced by people with disabilities in the recruitment of Civil Servants in Batam City in 2019. The method used is the descriptive qualitative. The result of this research is the obstacles experienced by people with disabilities in the recruitment of Civil Servants in Batam City in 2019 are the availability of formations provided by the government that are not in accordance with the majors they have, there is no socialization and training agenda for people with disabilities, and the government does not provide an application as a test aid for participants with visual disabilities as they cannot do the exam independently.*

*Keywords: People with disabilities, Civil Servant Recruitments, Barriers.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

## I. Pendahuluan

Penyandang disabilitas sebagai seseorang yang memiliki kekurangan dalam fisik atau mental yang dalam hal ini menghambat kegiatan pada umumnya, kesetaraan dalam mendapatkan hak bagi mereka sebagai warga Negara Indonesia serta aksesibilitas dalam perwujudan kesempatan adalah hal yang harus didapatkan bagi penyandang disabilitas. Dalam era globalisasi sekarang ini, dituntut hasil kerja yang serba cepat, setiap instansi dituntut oleh *customer* atau *citizen* cepat dalam melayani dan memperluas pangsa pasarnya. Perusahaan dan instansi penyedia lapangan kerja menginginkan kinerja yang optimal dari pada tenaga kerjanya. Sayangnya tidak semua sumber daya manusia memiliki kapasitas yang sama. Keanekaragaman khususnya terkait kondisi fisik seseorang menjadi pertimbangan pemilik dunia usaha atau penyedia lapangan kerja dalam memilih tenaga kerja yang mereka gunakan. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Melihat pada hal tersebut dibutuhkan pemahaman serta implementasi yang dapat mendukung penyandang disabilitas dengan perwujudan pemenuhan upaya dalam pengembangan diri melalui kemandirian dalam berkarya maupun karir yang dimiliki serta menjadi manusia yang bermartabat, bukan hanya dipandang dengan prespektif hak yang bersifat jaminan sosial maupun peningkatan kesejahteraan sosial. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per-Februari 2019 tercatat jumlah penduduk Indonesia dengan usia kerja bagi penyandang disabilitas mencapai 20,98 juta orang dan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 10,19 juta orang. (Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)). Di Kota Batam penyandang disabilitas berjumlah 669 jiwa, dimana usia produktif 15-64 Tahun berjumlah 288 jiwa. Dengan kategori Tuna Daksa berjumlah 38 jiwa, Tuna Netra berjumlah 24 jiwa, Tuna Rungu/Wicara berjumlah 35 jiwa, Tuna Grahita berjumlah 23 jiwa dan Disabilitas lainnya berjumlah 168 jiwa. (Sumber Data: PMKS Dinas Sosial Kota Batam).

Tabel 1. Rincian Formasi CPNS Penyandang Disabilitas di Kepulauan Riau Tahun 2018

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Tahun 2018	
				Ada	Tidak
1	<b>Pemerintah Provinsi Kepri</b>				
	Guru Seni Budaya Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Seni Budaya/ Seni Musik/Seni Rupa/Seni Tari	1		✓
2	<b>Pemerintah Kabupaten Karimun</b>				
	Guru TK Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	2		✓
3	<b>Pemerintah Kabupaten Natuna</b>				
	—	—	—		—
4	<b>Pemerintah Kabupaten Anambas</b>				
	Guru Agama Islam Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Agama Islam	1		✓

	Guru Bimbingan Konseling Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling	1		✓
5	<b>Pemerintah Kota Tanjungpinang</b>				
	Guru Seni Budaya Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Seni Musik/ Seni Tari/ Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan	1		✓
6	<b>Pemerintah Kota Batam</b>				
	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	S-1/ D-IV Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur	1		✓
	Pranata Laboratorium Kesehatan Trampil	D-III Teknik Laboratorium	1	✓	
7	<b>Pemerintah Kabupaten Karimun</b>				
	Guru Kelas Ahli Pertama	S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	2		✓

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 Pemerintah Kota Batam mendapatkan kuota 363 formasi CPNS. Dengan rincian tujuh formasi khusus Guru Tenaga Honorer K-2, 17 formasi untuk Lulusan Cumlaud dari Universitas dan Jurusan Terakreditasi A, dua formasi bagi Penyandang Disabilitas, 190 formasi Guru Umum, 120 Tenaga Kesehatan Umum dan 27 Tenaga Teknis Formasi Umum. Tahun 2018 Pemerintah Kota Batam membuka dua formasi untuk penerimaan CPNS untuk penyandang disabilitas yaitu formasi pertama Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton, formasi kedua yaitu Pranata Laboratorium Kesehatan Trampil. Pada tahun 2018 penyandang disabilitas di Kota Batam hanya ada satu orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti tes CPNS dengan formasi Pranata Laboratorium Kesehatan Trampil. Sebagai Kota dengan memiliki formasi lain dari pada yang lain yaitu Tenaga Laboratorium Kesehatan Trampil.

Tabel 2. Rincian Formasi CPNS Penyandang Disabilitas di Kepulauan Riau Tahun 2019.

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Tahun 2019	
				Pelamar Ada	Tidak
1	<b>Pemerintah Provinsi Kepri</b>				
	Ahli Pertama- Guru SLB	S-1 Pendidikan Luar Biasa	2		✓
2	<b>Pemerintah Kabupaten Karimun</b>				
	–	–	–		–
3	<b>Pemerintah Kabupaten Natuna</b>				
	–	–	–		–
4	<b>Pemerintah Kabupaten Anambas</b>				
	Guru Kelas- Ahli Pertama	S-1 PGSD	3		✓
	Ahli Pertama- Guru Taman Kanak-kanak	S-1 PGTK	1		✓

5	<b>Pemerintah Kota Tanjungpinang</b>				
	Ahli Pertama- Analisis Kepegawaian	S-1 Sarjana Administrasi/ S-1 Ilmu Politik dan Kemasyarakatan/ S-1 Ilmu Pemerintahan/ S-1 Psikologi	1	✓	
	Pengelola Administrasi Pemerintahan	D-III Manajemen/ D-III Administrasi Negara/D-III Administrasi Pemerintahan	1		✓
6	<b>Pemerintah Kota Batam</b>				
	Guru Kelas- Ahli Pertama	S-1 PGSD	2		✓
	Pelaksanaan/ Terampil- Perekam Medis	D-III Perekam Medis	1		✓
7	<b>Pemerintah Kabupaten Karimun</b>				
	Verifikator Keuangan	D-III Akutansi, Manajemen, Administrasi Perkantoran	3		✓

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan tabel diatas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa jumlah jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas untuk instansi daerah paling sedikit 2 (dua) persen dari total formasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Kota Batam mendapatkan kuota sebanyak 140 formasi CPNS, 71 formasi untuk Tenaga Pendidikan, 42 formasi Tenaga Kesehatan dan 27 formasi Tenaga Teknisi, dimana 2 (dua) persen dari keseluruhan formasi di Kota Batam yaitu 140 formasi adalah 2,8. Kota Batam membuka 2 (dua) formasi dengan 3 (tiga) alokasi bagi penyandang disabilitas yaitu formasi Pertama Ahli Pertama- Guru Kelas dan formasi yang kedua Pelaksanaan / Terampil- Perekam Medis. Tahun 2019 dalam rekrutmen CPNS di Kota Batam ini tidak ada penyandang disabilitas yang mendaftarkan diri untuk mengikuti tes CPNS.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menimbulkan rumusan masalah yaitu Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas di Kota Batam. Dengan tujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas di Kota Batam. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat yaitu teoritis dan praktis.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sungiyono (2017:8) adalah suatu metode penelitan yang berlandasan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data induktif atau kualitatif, penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, data cara induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:224) yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi) yang menggunakan alat pengumpulan data yaitu buku catatan, *handphone record*, dan *handphone camera*. Teknik analisa data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	1
2	Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Batam	1
3	Penyandang Disabilitas Di Kota Batam	2
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

### III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang faktor –faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas di Kota Batam tahun 2019 ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Tabel 4. Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Perbedaan
1	Penelitian oleh Ahmad Tosirin Anaessaburi	Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta.	• Pada penelitian Ahmad Tosirin Aneassaburi membahas tentang pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas Netra dan pada penelitian ini hanya fokus kepada penyandang disabilitas Netra.
2	Penelitian oleh Muhamad Ikhsan Kamil	Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang.	• Pada penelitian ini fokus kepada pemberian kerja bagi penyandang disabilitas diperusahaan yang menyebabkan penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan.
3	Penelitian oleh Afifah	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Telah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	• Pada penelitian ini membahas mengenai penyandang disabilitas yang telah menjadi PNS dan bekerja dilingkungan pemerintahan.
4	Penelitian oleh Wardah Susiana	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN.	• Pada penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan di BUMN, penyandang disabilitas masih mengalami tantangan untuk bekerja di BUMN.

Sumber: Data Olahan peneliti, 2020.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori faktor penghambat implementasi oleh Bambang Sunggono (1994:151), yaitu:

## 1. Isi Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019. Dalam proses penentuan formasi dan jumlah formasi CPNS di Kota Batam membuat surat edaran ke OPD untuk menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja, setelah itu usulan kebutuhan pegawai tersebut di input melalui aplikasi e-formasi dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Melalui Surat Keputusan yang nantinya akan ditetapkan jumlah formasi di lingkungan Kota Batam kemudian melaksanakan rekrutmen CPNS di Kota Batam. Berdasarkan Pengumuman Nomor 31/BKPSDM/HK/XI/2019 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 668 Tahun 2019 Tanggal 27 November 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Anggaran Tahun 2019 menyatakan, untuk kaum disabilitas yaitu formasi yang disediakan untuk penyandang disabilitas di Kota Batam adalah Ahli Pertama – Guru Kelas dengan alokasi formasi berjumlah 2 (dua) orang dan Pelaksanaan / Terampil- Perekam Medis dengan alokasi formasi berjumlah 1 (satu) orang. Rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas di Kota Batam Tahun 2019 memiliki 2 formasi dengan kebutuhan 3 (tiga) orang. Dimana sistem pendaftaran daring terintegrasi melalui portal sistem seleksi calon ASN (SSCASN) dan penyiapan fasilitas seleksi melalui *Computer Assisted Test* (CAT) yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

## 2. Informasi

Berdasarkan pengumuman Nomor 85/BKPSDM/HK/IX/2018, untuk formasi rekrutmen CPNS tiap tahunnya memiliki formasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti tahun 2018 formasi yang ada untuk disabilitas adalah penguji laboratorium tanah, rumah, aspal, dan beton serta formasi lainnya yaitu pranata laboratorium kesehatan terampil. Lalu berdasarkan Pengumuman Nomor 31/BKPSDM/HK/XI/2019 untuk tahun 2019 formasi disabilitas adalah ahli pertama guru kelas dan pelaksanaan atau terampil rekam medis. Di tahun 2018 Kota Batam memiliki formasi untuk disabilitas yang berbeda dengan Kota lainnya di Kepulauan Riau. Pembukaan rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas pertama kali di tahun 2018 dengan pengujian laboratorium tanah, rumah, aspal, dan beton serta formasi lainnya yaitu pranata laboratorium kesehatan terampil, pembukaan rekrutmen CPNS tahun 2018 merupakan pertama kali ada formasi bagi penyandang disabilitas. Penentuan formasi yang ada mengacu kepada Permenpan dimana ada formasi yang lebih dari satu itulah yang dijadikan formasi bagi penyandang disabilitas, guna untuk mengakomodir formasi agar formasi tersebut tidak kosong.

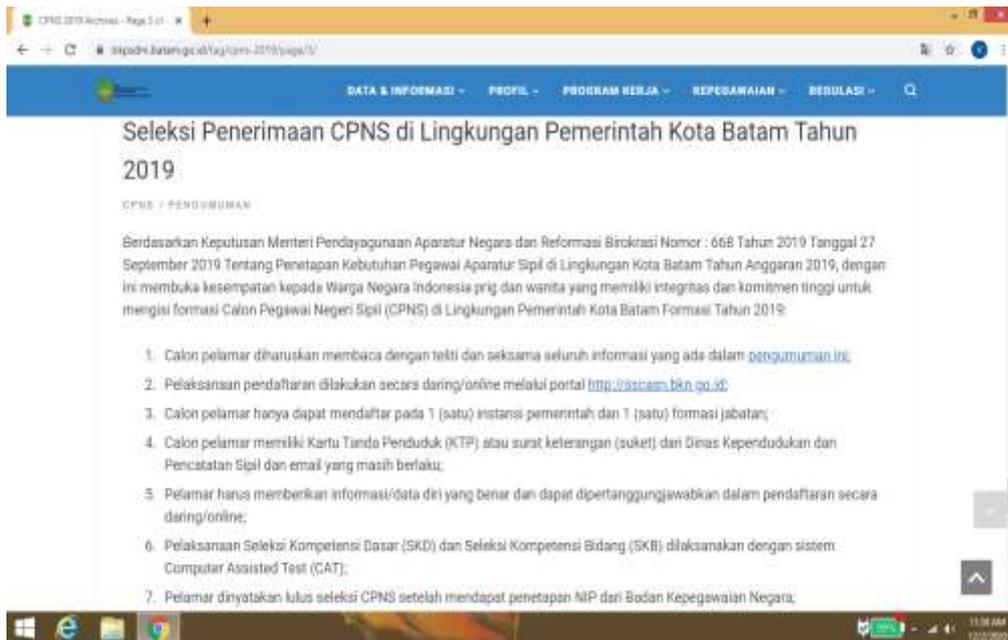
Terkait informasi rekrutmen formasi CPNS untuk tahun 2019, sistem informasi yang digunakan yaitu sistem pendaftaran daring terintegrasi melalui portal sistem seleksi calon ASN (SSCASN) dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai panitia seleksi penerimaan nasional. Informasi perekrutan CPNS mengacu pada pemerintah pusat yang menyampaikan melalui media elektronik, media massa maupun media sosial baik pada instansi pusat maupun instansi daerah. Dari pusat tidak ada mengadakan agenda sosialisasi bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen CPNS ini, karena hal ini mengacu kepada Permenpan yang menyatakan harus mempunyai formasi untuk disabilitas dan juga mengacu kepada pusat dengan menyatakan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas serta kemudian menyebarkan informasi melalui *website*. Jadi, sistem informasi yang digunakan yaitu sistem

pendaftaran daring terintegrasi melalui portal sistem seleksi calon ASN (SSCASN) dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai panitia seleksi penerimaan nasional.

Dalam rekrutmen CPNS ini memang tidak ada sosialisasi secara langsung namun informasi terkait proses rekrutmen CPNS seperti informasi *real time* tentang jumlah pelamar pada formasi tertentu dari kementerian/ lembaga/ daerah tertentu di *website* maupun sosial media yaitu akun instagram @bkngoidofficial dan *website* resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yaitu bkpsdm.batam.go.id Secara keseluruhan informasi terkait proses CPNS tahun 2019 dapat diakses dengan melalui akun instagram BKN maupun *website* resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam, dengan harapan masyarakat dapat memperoleh data dan informasi dengan mudah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa informasi yang diunggah di instagram @bkngoidofficial dan *website* resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yaitu bkpsdm.batam.go.id terkait rekrutmen CPNS, berikut adalah informasi yang diberikan melalui Instagram @bkngoidofficial serta informasi yang diberikan melalui *website* resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :



Gambar 1. Formasi CPNS Tahun 2019



Gambar 2. Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2019.

Akan tetapi dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas berjalan kurang maksimal dimana pemerintah Kota Batam telah menyediakan kuota sebanyak 3 alokasi formasi (guru dan perekam medis) bagi penyandang disabilitas dari jumlah kuota keseluruhan sebanyak 2.14% dari yang dipersyaratkan paling sedikit 2 (dua) persen dari total formasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Menteri Penyandanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019. Tetapi untuk formasi disabilitas CPNS tahun 2019 di Kota Batam tidak ada peserta yang mendaftar. Hal ini terjadi karena keterbatasan sistem informasi dan tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan penyandang disabilitas, dalam perekrutan CPNS ini BKPSDM hanya mengikuti aturan dari pusat dan menyesuaikan kebutuhan formasi sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, seharusnya harus ada koordinasi dengan penyandang disabilitas agar formasi yang diberikan tepat sasaran dengan kebutuhan disabilitas yang ada di Kota Batam, sehingga formasi yang disediakan itu tidak kosong, penyandang disabilitas tidak mendaftar dikarenakan formasi yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan jurusan penyandang disabilitas. Jadi, seharusnya ada koordinasi antara pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Batam dalam menentukan formasi yang diberikan untuk penyandang disabilitas agar formasi yang diberikan untuk penyandang disabilitas tepat sasaran dan juga tidak akan kosong seperti sekarang.

### 3. Dukungan

Dalam pelaksanaan tes CPNS di Kota Batam bagi penyandang disabilitas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam masih belum memiliki aplikasi sebagai alat bantu ujian bagi peserta yang memiliki keterbatasan penglihatan untuk mengubah teks menjadi suara agar peserta disabilitas netra dapat melakukan ujian secara mandiri akan tetapi untuk sementara solusi oleh instansi terkait adalah dengan menyediakan petugas/pendamping saat pelaksanaan SKD dan SKB bagi peserta atau penyandang disabilitas. pemerintah Kota Batam seharusnya menyediakan alat bantu ujian terutama bagi penyandang disabilitas netra dengan cara memberikan aplikasi *NonVisual Desktop Acces*, agar penyandang disabilitas netra lebih mudah dalam mengerjakan soal pada saat ujian CPNS.

Pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas dan mempersiapkan formasi itu sesuai dengan keadaan yang ada di lapangannya, seperti diadakannya pelatihan atau sosialisasi agar bisa menentuka formasi yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas dan bernegosiasi dengan Oorganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lainnya untuk memberikan formasi tersebut kepada penyandang disabilitas. Kemudian disabilitas netra juga merasakan kesulitan dengan bantuan dari panitia pembaca layar yang membantu pada saat ujian CPNS karena lambat membacakan soal, pemerintah bisa menggantikan panitia pembaca soal dengan aplikasi *NonVisual Desktop Access* yang lebih membantu penyandang disabilitas daksa dalam melaksanakan ujian. Pemerintah boleh saja menggabungkan formasi disabilitas dengan formasi umum, tetapi pemerintah harus memberikan dukungan dan kesempatan serta pengembangan bagi penyandang disabilitas secara maksimal.

#### **4. Pembagian Potensi**

Pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara tidak hanya dilakukan secara mandiri oleh pemerintah Kota Batam melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tetapi hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. dalam pelaksanaan CPNS di Kota Batam yang menjadi *stakeholder* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan mengeluarkan peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam rekrutmen CPNS oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kemudian Badan Kepegawaian Negara (BKN) dimana Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan panitia seleksi penerimaan Nasional dan dalam pelaksanaan ujian dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) lah yang memiliki sistem tersebut. Setelah itu yang menjadi *stakeholder* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam yaitu Kantor Regional BKN XII Pekanbaru mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara diwilayah kerjanya yang wenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa hambatan yang di alami penyandang disabilitas dalam rekrutmen CPNS di Kota Batam Tahun 2019 dalam faktor penghambat kebijakan rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas Kota Batam yaitu formasi yang tersedia membuat mereka tidak bisa mendaftar dikarenakan jurusan mereka tidak ada di formasi tersebut yang menyebabkan mereka harus mencari formasi yang sesuai dengan jurusan mereka di luar Batam. Faktor penghambat Informasi dalam rekrutmen CPNS tahun 2019 di Kota Batam bagi penyandang disabilitas, pemerintah memberikan informasi melaluin website portal pemerintah Kota Batam. Dalam pemberian informasi ini, pemerintah pusat tidak mengadakan agenda sosialisasi bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kota Batam. Pemerintah hanya memberikan informasi melalui media sosial dan website resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam. Penyediaan kouta 2 (dua) persen yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan dilapangan yang menyebabkan kekosongan formasi khusus bagi penyandang disabilitas pada tahun 2019. Faktor penghambat dukungan dari pemerintah dalam rekrutmen CPNS bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal, dimana permerintah belum memiliki aplikasi sebagai alat bantu ujian bagi peserta penyandang disabilitas netra dimana tidak dapat melakukan ujian secara mandiri dengan membutuhkan petugas pendamping dalam pelaksanaan ujian tersebut.

## V. Daftar Pustaka

### Buku:

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.  
Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.  
Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakanaksanaan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress.

### Skripsi/Jurnal:

- Afifah. 2016. *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Yang Telah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi. Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Andalas, Padang.  
Aneassaburi, Ahmad Tosirin. 2017. *Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Ilmu Hukum, Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.  
Kamil, Muhamad Ikhsan. 2018. *Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang*. Skripsi. Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.  
Susiana, Wardah. *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN*. Law Reform, Vol 15: 2.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

### Sumber Lain (Internet):

- Data formasi penerimaan CPNS Tahun 2018 di Kepulauan Riau  
<https://kepriprov.go.id/file/pengumumanseleksiCPNSProvKEPRItahun2018gabung.pdf>.  
Diakses 27 Februari 2020 pukul 14.45 WIB.
- Data formasi penerimaan CPNS Tahun 2018 di Kota Batam  
<https://bkpsdm.batam.go.id/seleksi-penerimaan-calon-pegawai-negeri-sipil-cpns-di-lingkungan-pemerintah-kota-batam/>. Diakses 27 Februari 2020 pukul 14.30 WIB.
- Badan Kepegawaian Negara. Diakses pada tanggal 25 September 2020.